

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan hidup negara dapat dilihat dari kelangsungan hidup rakyatnya. Negara melakukan aktivitas kenegaraanya untuk mempertahankan kelangsungan hidup negara itu sendiri. Aktivitas yang dilakukan oleh negara membutuhkan sejumlah dana yang besar untuk membiayainya, dan pendanaan tersebut berasal dari penghasilan yang didapat oleh negara, salah satunya di dapat dari pemungutan pajak. Penghasilan tersebut dipergunakan untuk membiayai kepentingan negara yang pada akhirnya akan memenuhi kepentingan individu-individu dalam hal kesehatan, kesejahteraan, pendidikan dan sebagainya.. Jadi dimana ada kepentingan masyarakat akan negara, disitu juga timbul pemungutan pajak, tetapi ada kalanya pemungutan pajak tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Dilihat dari sudut pandang perekonomian di Indonesia, pajak merupakan iuran wajib yang di pungut oleh pemerintah, dengan tujuan untuk mensejahterahkan kehidupan masyarakat. Iuran tersebut akan mengurangi kekayaan individu, tetapi pemungutan tersebut akan kembali lagi kepada masyarakat, melalui pengeluaran-pengeluaran rutin dan pengeluaran-pengeluaran untuk pembangunan oleh pemerintah yang akan bermanfaat bagi kepentingan umum sehingga dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Wajib pajak berusaha untuk membayar pajak dalam jumlah yang sekecil mungkin karena dengan membayar pajak akan mengurangi kemampuan untuk memenuhi keadaan ekonomis wajib pajak itu sendiri. Bagi pemerintah semakin banyak yang membayar pajak maka akan semakin bertambah kekayaan negara, sehingga dengan mudah dalam pencapaian tujuan pemerintah.

Bagi wajib pajak badan yaitu perusahaan, yang setiap kegiatannya selalu mencatat transaksi-transaksi keuangan ke dalam catatan-catatan akuntansi menurut standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Sehingga nantinya akan menghasilkan informasi mengenai keadaan keuangan perusahaan yang dapat dipergunakan untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan

berdasarkan laporan keuangan tersebut harus dilakukan penyesuaian sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang Perpajakan. Dalam hal pembukuan ini, perusahaan tentunya membuat laporan keuangan berupa laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan. Penyusunan laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan pun diatur dalam bentuk Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang nantinya akan menghasilkan laporan keuangan komersil. Akan tetapi terdapat perbedaan kepentingan dengan pemerintah yang membutuhkan laporan keuangan berdasarkan ketentuan perpajakan sebagai dasar untuk menghitung pajak penghasilan yang akan disetorkan kepada pemerintah.

Karena adanya perbedaan kepentingan antara laba atau rugi menurut perhitungan akuntansi komersil dengan perhitungan koreksi fiskal berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008, maka sebelum dilakukan perhitungan pajak penghasilan yang terutang, terlebih dahulu laba atau rugi komersil tersebut. Dengan demikian, untuk keperluan perpajakan wajib pajak tidak perlu membuat laporan keuangan ganda, tetapi cukup membuat laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), serta pada saat mengisi SPT Tahunan PPh terlebih dahulu akan dilakukan koreksi fiskal. Koreksi ini dilakukan baik terhadap penyusutan, penghasilan, dan biaya-biaya yang dipergunakan oleh subjek pajak.

Pada laporan ini, yang menjadi objek penulisan adalah KPRI Dharma Karya yang membuka usaha Unit Simpan Pinjam (USP), Tabungan Koperasi. Biro Perjalanan dan UKM Mart. Dalam melaporkan usahanya pasti diperlukan laporan keuangan yang baik yang sesuai dengan standar yang ada. Untuk keperluan perpajakan laporan keuangan harus disusun sesuai dengan peraturan perpajakan. KPRI Dharma Karya Palembang ini belum membuat koreksi fiskal menurut peraturan perpajakan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menganalisis laporan keuangan yang disajikan perusahaan agar sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku.

Dari gambaran tersebut, penulis tertarik untuk menyusun laporan akhir ini dengan judul **“Analisis Perhitungan Koreksi Fiskal Berdasarkan Undang-**

Undang Perpajakan Nomor 36 tahun 2008 pada KPRI Dharma Karya Palembang”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik mengambil permasalahan yang terdapat pada KPRI Dharma Karya Palembang yaitu :

1. KPRI Dharma Karya Palembang memasukan penghasilan dan biaya yang tidak diakui menurut Undang-Undang Pajak Nomor 36 tahun 2008.
2. Belum dilakukan koreksi fiskal berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 tahun 2008 terhadap laporan perhitungan sisa hasil usaha KPRI Dharma Karya Palembang sehingga hasil usaha yang didapat bukan merupakan hasil usaha fiskal.

Berdasarkan rumusan masalah ini, maka penulis berpendapat bahwa permasalahan utama yang dihadapi oleh KPRI Dharma Karya Palembang ialah belum dilakukannya perhitungan koreksi fiskal menurut Undang-Undang Pajak Nomor 36 tahun 2008 pada KPRI Dharma Karya Palembang.

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Agar penulisan laporan Akhir ini tidak melenceng dari pembahasan penulis hanya membatasi pada perhitungan hasil usaha kena pajak pada laporan keuangan perusahaan yang dihitung berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan serta perhitungan terhadap hasil usaha kena pajak pada laporan keuangan fiskal berdasarkan Undang-Undang Pajak nomor 36 tahun 2008 untuk laporan keuangan KPRI Dharma Karya Palembang tahun 2015.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.4.1 Tujuan Penulisan

- a. Untuk mengetahui hal-hal yang perlu disesuaikan dalam menetapkan hasil usaha fiskal berdasarkan peraturan perpajakan.
- b. Untuk mengetahui bagaimana cara melakukan koreksi fiskal, jika terjadi perbedaan pengakuan hasil usaha kena pajak antara perhitungan

perusahaan dengan perhitungan berdasarkan Undang-Undang Pajak Nomor 36 tahun 2008.

1.4.2 Manfaat Penulisan

- a. Hasil penulisan ini dapat dijadikan masukan untuk membuat laporan koreksi fiskal menurut peraturan perpajakan No 36 Tahun 2008.
- b. Dapat menjadi bahan pembelajaran bagi KPRI Dharma Karya Palembang mengenai perpajakan khususnya koreksi fiskal.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam menyusun laporan akhir ini dibutuhkan data yang yang akurat, objektif serta mendukung untuk menyelesaikan masalah yang ada pada perusahaan. Pada pembuatan laporan akhir ini penulis menggunakan metode berupa wawancara yang telah dilakukan pada KPRI Dharma Karya Palembang.

Menurut Sugiyono (2013:194), untuk mengumpulkan data dapat dilakukan dalam beberapa metode yaitu :

- 1) Interview (Wawancara)
Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan masalah yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondenya sedikit/kecil. dapat dilakukan secara terstruktur (peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh) maupun tidak terstruktur (peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap sebagai pengumpul datanya) dan dapat dilakukan secara langsung (tatap muka) maupun secara tidak langsung (melalui media seperti telepon).
- 2) Kuesioner (Angket)
Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Serta merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang diharapkan dari responden.

1.6 Sistematika Penulisan

Secara garis besar laporan akhir ini terdiri dari 5 (lima) bab yang isinya mencerminkan susunan atau materi yang akan dibahas, dimana tiap-tiap bab memiliki hubungan yang satu dengan yang lain. Berikut ini akan diuraikan mengenai sistematika pembahasan laporan akhir ini secara singkat yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, akan diuraikan latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah, ruang lingkup permasalahan, tujuan dan manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini mengemukakan tentang uraian pendapat atau teori-teori dari para ahli perpajakan yang dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan. Dalam hal ini penulis mengemukakan hal-hal mengenai pengertian pajak, pengertian pajak penghasilan, subjek pajak penghasilan, objek pajak penghasilan, tarif pajak penghasilan, laporan keuangan fiskal, perhitungan hasil usaha fiskal, penyusutan, penghasilan dan biaya.

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Pada bab ini diuraikan mengenai gambaran umum perusahaan yang meliputi sejarah berdirinya KPRI Dharma Karya Palembang, struktur organisasi, pembagian tugas, permodalan koperasi, dan laporan keuangan koperasi.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menganalisis permasalahan pada perusahaan dengan membandingkan data-data yang ada pada perusahaan di bab tiga dengan teori-teori yang diungkapkan pada bab dua, yaitu meliputi koreksi fiskal berdasarkan undang-undang pajak nomor 36 tahun 2008 dan menetapkan hasil usaha fiskal pada KPRI Dharma Karya Palembang.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis menarik suatu kesimpulan dari analisa data tersebut dan memberi saran-saran demi kebaikan perusahaan sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam laporan akhir.